JAWABAN TUGAS 3

Rhiza S. Sadjad
NIM 045276176

Fakultas : FHISIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode>Nama MK : **SOSI4408.6/Sosiologi Politik 6**
Tugas : 3

Pertanyaan 1/2:

Demokrasi di Indonesia memiliki dinamika yang cukup menarik untuk dianalisa. Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam memperkuat demokrasi sejak transisi ke demokrasi pada tahun 1998, masih ada beberapa masalah dan tantangan yang perlu diatasi. Berilah penjelasan anda tentang kelemahan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sertai jawaban Anda dengan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan lupa cantumkan sumber yang terpercaya!

Jawaban 1/2:

Tentang demokrasi telah dibahas dalam referensi [1], **Modul 07**, hal. **7.3 – 7.23**, tapi tidak diperoleh uraian tentang kelemahan-kelemahan implementasi-nya di Indonesia. Dari referensi [2], diperoleh informasi tentang berbagai kelemahan implementasi demokrasi di negara-negara sedang berkembang (*developing countries*). Karena Indonesia masih tergolong negara yang sedang berkembang, maka sedikit banyak kelemahan implementasi demokrasi di negara-negara berkembang cukup relevan dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- *Kelemahan kelembagaan*. Lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia, dari pusat sampai ke daerah, memiliki kedudukan yang lemah secara struktural, rentan terhadap intervensi dari kekuasaan, baik eksekutif mau pun legislatif, juga rawan terlibat dalam praktek-praktek koruptif.
- *Kesenjangan ekonomi*. Kelas menengah di Indonesia belum tumbuh dan berkembang secara normal, sehingga belum dapat berfungsi menjadi penyangga antara *elite* politik kelas atas dan masyarakat pemilih di kelas bawah, sehingga sangat rentan dengan *money politics* dalam segala macam bentuknya (BANSOS, Politik Sembako, dan lain-lain).
- *Pendidikan dan Budaya Politik*. Masih kurangnya pendidikan politik yang dapat mengembangkan budaya politik yang sehat dan cerdas.
- *Pendekatan Ethnis dan Sektarian*. Walau pun sudah semakin dapat di-minimalisir, pendekatan politik identitas dengan menggunakan simbol-simbol kesukuan dan keagamaan masih belum dapat dihindari sepenuhnya.
- *Praktek-praktek Kecurangan*. Semakin banyak pengalaman melaksanakan Pemilu, semakin canggih juga praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh peserta dan (ditengarai) oleh penyelenggara Pemilu, bahkan oleh aparat yang seharusnya bersikap netral. Karena

semakin canggih modus-nya, maka semakin sulit juga di-deteksi. Kecurangan yang dilakukan pada Pemilu 2024, banyak pihak yang mempercayai bersifat TSM (Ter-struktur, Sistematis dan Masif), walau pun pada akhirnya sulit dibuktikan secara formal-material di pengadilan.

- *Pengaruh eksternal.* Karena berbagai kepentingan internasional dan global, ditengarai terdapat juga campur-tangan dan intervensi dari pihak luar-negeri, walau pun tidak tampak bersifat TSM, hanya bersifat sporadis dan sulit dibuktikan.
- *Teknologi.* Dalam Pemilu 2024 yang lalu terjadi kontroversi yang disebabkan oleh pemanfaatan teknologi digital yang belum matang, yaitu kasus SIREKAP. Pengalaman (pahit) ini hendaknya menjadi pelajaran yang berharga, yaitu bahwa penerapan suatu teknologi itu memerlukan persiapan yang matang, diuji-coba, dan di-antisipasi semua risiko dan kendala, sebelum di-implementasi-kan secara masif.
- *Mis-informasi dan Propaganda.* Media *main-stream* mau pun media sosial masih terus digunakan untuk menebar *hoax* dan kebencian, walau pun pada Pemilu 2024 yang lalu sudah jauh lebih baik dan tidak separah jika dibandingkan dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya, ketika terjadi polarisasi yang tajam di masyarakat.

Kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan demokrasi yang tampak dalam Pemilu 2024 yang lalu merupakan tantangan yang harus dijawab dengan strategi yang tepat dan jitu pada masa yang akan datang, termasuk di antaranya penguatan struktur kelembagaan penyelenggara Pemilu, peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga memiliki kekebalan terhadap *money politics* dan semacamnya, penegakan hukum yang konsisten, konsekuen dan tidak tebang pilih, serta penguatan pendidikan politik dan pembudayaan politik yang sehat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang ideal.

Pertanyaan 2/2:

Berilah analisis saudara tentang pelaksanaan demokrasi elektoral pada pilpres 2024. Apakah demokrasi elektoral (pemilu presiden 2024) sudah mencerminkan demokrasi yang ideal/baik atau tidak? Berikan jawaban anda dengan menyertakan rujukan yang digunakan. Sekurang-kurangnya dari bahan modul BMP yang telah disediakan.

Jawaban 2/2:

Dalam referensi [1], **Modul 07**, yang membahas tentang demokrasi, tidak secara spesifik menguraikan tentang Pilpres, walau pun ada uraian tentang bagaimana seharusnya demokrasi yang baik/ideal dilaksanakan, antara lain dengan bentuk “demokrasi majemuk” [hal. 7.12 – 7.13]. Menurut saya (pribadi), pelaksanaan Pilpres 2024 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan Pilpres-Pilpres sebelumnya, terutama karena ada 3 (tiga) pasangan Capres-Cawapres, sehingga tidak terjadi polarisasi yang tajam di masyarakat pemilih sebagaimana dalam Pilpres-Pilpres

sebelumnya ketika hanya diikuti oleh dua pasangan Capres-Cawapres. Hanya saja dari segi penyelenggaraan, terjadi berbagai kecurangan, yang ditengarai (walau pun tidak dapat dibuktikan) dilakukan secara TSM (Ter-struktur, Sistematis dan Masif) justru oleh aparat pemerintah (eksekutif) yang ber-kolaborasi dengan penyelenggara Pemilu dan lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Konstitusi. Berbagai pelanggaran etika terbukti dilakukan oleh para penyelenggara, tapi berlalu begitu saja, karena tidak dapat dibuktikan sebagai pelanggaran hukum.

Dari segi hasilnya, sebenarnya kualitas dari pasangan Presiden-Wakil Presiden yang dinyatakan sebagai pasangan terpilih, menunjukkan kualitas dari pemilih di Indonesia secara umum. Ibaratnya jika ada pilihan pasangan calon yang pendidikan formal-nya (setara) S3, S2 dan S1, maka yang terpilih justru pasangan calon yang pendidikan formal-nya setara S1, mencerminkan bagaimana tingkat kecerdasan pemilih dalam menentukan pilihannya. Artinya, mayoritas pemilih masih lebih mempercayai calon pemimpin yang pendidikan formal-nya lebih rendah dibandingkan calon-calon yang lain. Atau dengan kata lain, pendidikan formal para calon ternyata ber-korelasi negatif dengan preferensi pemilih. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal para calon, semakin sedikit masyarakat pemilih yang memilihnya.

Dari referensi [2], di-rekomendasi-kan beberapa *best-practices* dari tahapan-tahapan sebelum Pilpres sampai ke tahapan sesudahnya, sebagai berikut:

- *Per-Undang-Undang-an dan Peraturan*. Sebelum tahapan Pilpres berjalan, sebaiknya semua perangkat per-Undang-Undang-an dan Peraturan yang akan dijadikan “aturan main” sudah siap, *fixed* dan disepakati bersama oleh semua *stake-holders*, khususnya penyelenggara dan peserta Pilpres. Jangan seperti kemarin, munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang persyaratan (usia) Capres dan Cawapres pada saat tahapan Pilpres sudah mulai berjalan, ibaratnya seperti mengubah lebar gawang di lapangan sepakbola, ketika bola sudah melayang ditembakkan ke arah gawang tersebut. Tentu saja ini dirasa tidak *fair*.
- *Pendaftaran Pemilih*. Daftar Pemilih Tetap (DPT) seyogyanya disusun secara transparan, dan harus sudah selesai – *fixed* dan *verified* - paling lambat sebelum hari-H, untuk menghindari adanya pemilih “siluman”, sehingga terjadi penggelembungan suara dan/atau penghilangan suara.
- *Integritas dan Keamanan*. Pada hari-H, semua lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus aman dan steril dari berbagai kepentingan, baik kepentingan peserta atau pun pihak-pihak lain yang tidak relevan, sehingga semua pemilih dapat memberikan suaranya dengan tenang, damai dan tanpa tekanan.
- *Pemungutan Suara*. Semua petugas di TPS, termasuk PPS, Panwaslu, saksi-saksi, sudah siap dan memahami tugas serta wewenangnya masing-masing, bebas dari segala intervensi

dan tekanan dari pihak lain. Prosedur yang sudah ditetapkan harus diikuti secara detail tanpa kecuali.

- *Perhitungan dan Rekapitulasi Suara.* Harus dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Jika digunakan sistem baru (misalnya SIREKAP dalam Pemilu 2024 lalu), maka semua pihak harus memahami fungsi dan cara kerjanya dengan sebaik-baiknya, mengetahui semua kelebihan dan kekurangannya, serta berbagai keterbatasan dan kendala di lapangan.
- *Partisipasi Publik.* Semua tahapan proses perhitungan suara dan rekapitulasi-nya secara berjenjang dari TPS-TPS ke kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai ke pusat, harus berlangsung secara transparan, dapat dipantau oleh siapa saja, dan apabila ada kesalahan, maka harus dapat dengan cepat dan mudah di-koreksi. Harus ada mekanisme *cross-check* di semua jenjang, sehingga apabila terjadi kesalahan, yang disengaja mau pun yang tidak disengaja, dapat segera ter-deteksi dan cepat dilakukan koreksi.

Jika semua *best practices* di atas dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka akan terlaksana Pilpres yang bisa dipercaya oleh masyarakat, demokratis sesuai standar internasional dan secara inklusif melibatkan partisipasi publik, sehingga menghasilkan pemerintahan yang kuat, dipercaya rakyat dan stabil secara politis, yaitu pemerintahan yang diperlukan untuk keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat madani yang adil dan makmur.

REFERENSI

- [1] **Arie S. Soesilo, Dodi Prayogo dan Purwatiningsih**, “*Sosiologi Politik*”, Modul 1 – 9, SOSI4408, Edisi 2 [Agustus 2023], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
- [2] **ChatGPT**, Aplikasi *Chatting* berbasis AI, dalam Sistem Operasi Android. Referensi yang direkomendasikan untuk topik kelemahan pelaksanaan demokrasi dan topik terkait Pilpres:
  - (a) **Larry Diamond, Juan J. Linz and Seymour Martin Lipset (ed.)**, “*Democracy in Developing Countries: Africa*”, berisi studi kasus dan analisis terkait transisi demokrasi di beberapa negara di Afrika.
  - (b) **Samuel P. Huntington**, “*The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*”, menggambarkan fenomena global dari proses demokratisasi yang melanda dunia sejak tahun 1970-an, termasuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya di negara-negara sedang berkembang.
  - (c) **Armatya Sen**, “*Development as Freedom*”, walau pun tidak secara spesifik membahas tentang demokrasi, buku ini membahas tentang peranan kebebasan politik dan pemerintahan yang demokratis dalam pembangunan.
  - (d) **Juan J. Linz and Albert Stepan**, “*Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America and Post-Communist Europe*”, membuat analisis studi banding transisi demokratis di antara negara-negara sedang berkembang.
  - (e) **Dieter Nohien and Florian Grotz**, “*Elections: A Global Perspective*”, memberikan gambaran umum tentang sistem elektoral dan prosesnya di seluruh dunia, termasuk berbagai pelaksanaan Pilpres.
  - (f) **John Hardin Young (ed.)**, “*Internasional Election Principles: Democracy and the Rule of Law*”, menguraikan tentang prinsip-prinsip dasar dari pemilihan yang bebas dan adil, beserta berbagai contoh dalam prakteknya di beberapa negara di dunia.